

## ABSTRAKS

### **Deani Indah Agustiani : “Evaluasi Anggaran Belanja Langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019”**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk belanja daerah. Anggaran belanja daerah adalah suatu kewajiban perangkat daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja salah satunya adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan/program. Kegiatan dan program yang dianggarkan dari belanja langsung dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan SKPD, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Leles. Kecamatan Leles merupakan salah satu SKPD yang melaksanakan kegiatan anggaran belanja langsung. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung di Kecamatan Leles tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja langsung yang masih belum optimal karena rendahnya penyerapan anggaran serta terjadi inefektivitas dalam alokasi anggaran. Anggaran belanja Kecamatan Leles perlu dievaluasi berdasarkan penerapan beberapa prinsip evaluasi dalam belanja langsung.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip efektivitas; mengetahui pelaksanaan prinsip efisiensi; mengetahui pelaksanaan prinsip kecukupan; mengetahui pelaksanaan prinsip pemerataan; mengetahui pelaksanaan prinsip responsivitas; mengetahui pelaksanaan prinsip ketepatan, dalam anggaran belanja langsung pada Pemerintah Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Camat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan, dan Bendahara. Kemudian teknik analisis data menurut Miles and Huberman dengan langkah-langkahnya yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peneliti Menggunakan Teori William N. Dunn tentang evaluasi kebijakan yang memiliki enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan evaluasi anggaran belanja di Kecamatan Leles.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan prinsip efektivitas belanja langsung masih belum efektif karena terjadi hambatan-hambatan baik secara teknis maupun non-teknis; pelaksanaan prinsip efisiensi belanja langsung telah melakukan efisiensi sejak proses perencanaan serta realisasinya tidak melebihi target anggaran; pelaksanaan prinsip kecukupan belanja langsung masih belum mencapai sasaran anggaran yang telah ditargetkan dengan maksimal karena dinilai kurang efektif; pelaksanaan prinsip pemerataan belanja langsung dinilai baik dengan manfaat dari pencapaian hasil yang dirasakan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan; pelaksanaan prinsip responsivitas belanja langsung dinilai baik dengan memuaskan kebutuhan masyarakat dan target yang dianggarkan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja; pelaksanaan prinsip ketepatan belanja langsung bahwa hasil dari pencapaian belanja langsung berguna bagi pemerintah dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi pelayanan dan tepat sasaran.

**Kata kunci: Evaluasi, Belanja, Langsung.**

## ABSTRACTS

### ***Deani Indah Agustiani: "Evaluation of the Direct Expenditure Budget at the Leles District Government, Garut Regency in 2019"***

*Since the enactment of Law Number 33 of 2004, local governments have been given the authority to allocate their budget for regional expenditures. The regional budget is an obligation of regional apparatus which is recognized as a deduction from the value of net assets. Regional budgets are classified based on the type of expenditure, one of which is direct expenditure. Direct expenditures are expenditures that are directly related to activities/programs. Activities and programs that are budgeted from direct expenditures are formed in order to meet the needs and achieve the goals of the SKPD, including those carried out by the Leles District Government. Leles District is one of the SKPDs that carry out direct budget activities. However, in reality, the implementation of direct budget realization in Leles District does not always go according to plan. Several problems were found in the implementation of direct expenditures that were still not optimal due to low budget absorption and ineffectiveness in budget allocations. The Leles sub-district budget needs to be evaluated.*

*The purpose of the research conducted by this researcher is to determine the implementation of the principle of effectiveness; know the implementation of efficiency principles; know the implementation of the adequacy principle; know the implementation of the smoothing principle; know the implementation of the principle of responsiveness; know the implementation of the principle of accuracy, in the direct budget for the Leles District Government, Garut Regency in 2019.*

*The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used are library research, interviews, and documentation studies. The informants in this study were the Secretary of the Sub-District Head, Head of the Sub-Division of General Affairs, Head of the Sub-Division of Finance, and the Treasurer. Then the data analysis technique according to Miles and Huberman with the steps, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*Researchers Use William N. Dunn's Theory of policy evaluation which has six dimensions, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. These dimensions are used to see the extent to which the evaluation of the budget in Leles District is implemented.*

*Based on the research results obtained from the interviews, it can be concluded that: The implementation of the principle of the effectiveness of direct spending, especially on personnel expenditures is included in the less effective category; The implementation of the principle of direct expenditure efficiency has made efficiency since the planning process and its realization does not exceed the budget target; The implementation of the principle of adequacy of direct expenditure has not yet reached the maximum targeted budget target because it is considered less effective; The implementation of the principle of equitable distribution of direct expenditures is considered good with the benefits of achieving results that are felt by the government as a service provider; The implementation of the principle of direct expenditure responsiveness is considered good by satisfying the needs of the community and the budgeted targets as stated in the Work Plan; Implementation of the principle of accuracy in direct spending that the results of the achievement of direct expenditure are useful for the government in terms of services and right on target.*

***Keywords: Evaluation, Expenditure, Direct.***